

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan didisiplin akademis. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Pada pembahasan mengenai konsep kesejahteraan sosial ini, peneliti membahas : pengertian kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, dan pekerjaan sosial.

2.1.1 Tinjauan tentang Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu disiplin ilmu sosial yang yang berorientasi untuk membantu individu, kelompok ataupun masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan yang perlu penanganan serius biasanya berkaitan dengan sosial dan ekonomi, penanganan permasalahan harus dilakukan secara sistematis oleh lembaga – lembaga baik pemerintah maupun swasta.

2.1.2 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Sasaran kesejahteraan keluarga berfokus pada peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan yang masuk dalam katagori keluarga miskin, keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I dalam hal ini kesejahteraan keluarga merupakan kajian bidang ilmu Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial

merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan di bidang sosial yang fokus kepada masyarakat dan masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2009 : 1) sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial yang sejahtera adalah pada saat tiap-tiap individu merasakan situasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara fisik, psikis, dan sosial untuk dapat melakukan perannya dalam masyarakat sesuai dengan tugas perkembangannya. Tujuannya untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam kehidupan yang sejahtera dalam kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga relasi-relasi sosial maupun lingkungannya.

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat. Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar dan norma-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual. Definisi mengenai

Kesejahteraan Sosial menurut Friedlander dikutip dalam Fahrudin (2012:9) adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.)

Definisi kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu pelayanan sosial dan institusi untuk membantu setiap individu, kelompok dan masyarakat untuk mencapai standar hidup yang memadai dan untuk mengembangkan suatu kemampuan serta kesejahteraan yang dimiliki baik oleh dirinya sendiri sehingga dapat melaksanakan peranan sosialnya yang dibutuhkan baik keluarganya ataupun dalam masyarakat agar kebutuhannya terpenuhi secara secara selaras.

2.1.3 Tujuan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam penerapannya dilingkungan sosial masyarakat, kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia guna mencapai suatu taraf kehidupan yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut Fahrudin (2012:10) terdapat dua tujuan utama dari kesejahteraan sosial yaitu :

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi – relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber – sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Kutipan diatas menyatakan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat diantaranya, dapat terpenuhinya standar

kehidupan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menggali sistem sumber yang dapat mengembangkan taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Undang – Undang No 11 Tahun 2009 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan

Penjelasan yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan dasar dalam menjalankan kelangsungan hidup seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dilingkungan masyarakat. Penjelasan yang kedua adalah mengembalikan keberfungsian sosialnya didalam masyarakat, dimana sebelumnya mempunyai masalah sosial. Penjelasan yang ketiga adalah menjaga dan mempertahankan kesejahteraan sosialnya pada saat mempunyai permasalahan dan masalah tersebut bisa dicegah dan ditangani. Penjelasan yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan peduli kepada orang – orang yang mempunyai masalah sosial untuk ditangani. Penjelasan yang kelima adalah meningkatkan kualitas terlaksananya kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang mempunyai masalah sosial.

2.1.4 Fungsi – Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan – tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan – perubahan sosio – ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi – konsekuensi sosial negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi – kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Friedlender dan Apte dalam Fahrudin (2012:12) fungsi – fungsi kesejahteraan sosial tersebut adalah :

a. Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah – masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan – kegiatan untuk membantu menciptakan pola – pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga – lembaga sosial baru.

b. Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi – kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi)

c. Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber – sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang (*support*)

Fungsi ini mencakup kegiatan – kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, fungsi pelayanan sosial pada hakikatnya adalah mencegah supaya terhindar dari masalah sosial yang baru, menanggulangi agar menghilangkan masalah sosial yang sedang terjadi, mengembangkan, serta menunjang masalah – masalah sosial yang terkait dengan kesejahteraan sosial bagi

individu, kelompok dan masyarakat, dimana sebagai investasi untuk mencapai tujuan pelayanan sosial.

2.2 Tinjauan Usaha – usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial dilakukan untuk peningkatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, agar terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup serta untuk meningkatkan peranan manusia dalam kehidupan sehari – hari.

2.2.1 Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial. Suharto (2010:4) mendefinisikan usaha kesejahteraan sosial yaitu : “Usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi – institusi sosial”. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, usaha kesejahteraan sosial merupakan bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.2 Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Menurut Suharto (2010:4), tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut : “Peningkatan standar hidup, Peningkatan keberdayaan, Penyempurnaan kebebasan”. Adapun penjelasan dari masing – masing tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok – kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Meningkatkan keberdayaan, melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan – pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

2.2.3 Fokus Usaha Kesejahteraan Sosial

Merujuk pada definisi *welfare* dari Howard Jones dalam Suharto (2010:8) yaitu : “ Tujuan utama usaha kesejahteraan sosial yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya”. Makna “kemiskinan dalam berbagai manifestasinya” tidak hanya menunjuk pada kemiskinan fisik, seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup bentuk masalah sosial yang terakait dengannya, seperti anak terlantar, pekerja anak, perdagangan manusia, pelaucaran, pengemis, pekerja migran dan manusia lanjut usia terlantar dan sebagainya”. Suharto (2010:9) mengungkapkan bahwa : “Usaha kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yaitu : pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat”. Maksudnya, usaha kesejahteraan berfokus pada beberapa pelayanan yang ada pada pemerintah seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan.

2.3 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial profesi yang memberikan pertolongan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam peningkatan keberfungsian sosial mereka dan membantu memecahkan masalah – masalah sosial mereka disebut dengan pekerjaan sosial. Pekerja sosial dalam menjalankan tugas berada dalam naungan badan sosial yang bergerak dalam pelayanan – pelayanan sosial.

2.3.1 Latar Belakang Pekerja Sosial

Pekerja sosial sebagai pengemban profesi memiliki peranan – peranan yang harus dijalankan sehubungan dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai permasalahan kondisi kehidupan manusia lanjut usia terlantar yang seharusnya mendapat perlindungan dan perhatian dari berbagai kalangan. Untuk mengetahui peran – peran tersebut, maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian pekerjaan sosial dikemukakan oleh asosiasi nasional pekerja sosial Amerika Serikat (NASW) yang dikutip Fahrudin (2012:60) Pekerjaan sosial dirumuskan sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan – tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai – nilai, prinsip – prinsip, dan teknik – teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan berikut : membantu orang memperoleh pelayanan – pelayanan nyata, memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu – individu, keluarga – keluarga, dan kelompok – kelompok, membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan – pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses – proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia tentang institusi – institusi sosial, ekonomi, dan kultural, dan tentang interaksi antara semua faktor ini.

Pekerjaan sosial mempunyai perhatian utama dalam meningkatkan atau memulihkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan komunitas. Tidak hanya itu pekerjaan sosial memberikan pelayanan – pelayanan bagi individu atau kelompok tersebut dalam mewujudkan aspirasi – aspirasi mereka. Pekerjaan sosial harus mengetahui perkembangan dan perilaku manusia baik interaksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga bisa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas – tugas kehidupan mereka.

2.3.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas kehidupannya, mengatasi kesulitannya, dan mewujudkan aspirasi nilai – nilai yang ada di masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut, menurut Dubois dan Miley dalam Suharto (2009:5) tujuan pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan – kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi, perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem – sistem yang memberikan kepada mereka sumber – sumber, pelayanan – pelayanan, dan kesempatan – kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem – sistem yang menyediakan orang dengan sumber – sumber dan pelayanan – pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial

Pekerja sosial harus bisa membangun kemampuan klien untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi, pekerja sosial membantu mengubungkan klien ke pelayanan sosial lembaga untuk diberikan pemecahan masalahnya, menyampaikan masukan – masukan kepada pelayanan sosial lembaga untuk memperbaiki keefektifan pelayanan tersebut, serta membantu mengembangkan dan

memperbaiki kebijakan – kebijakan sosial, baik itu kebijakan pemerintah dan kebijakan pelayanan lembaga.

2.3.3 Peran Pekerja Sosial

Ditinjau pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez yang dikutip dalam Suharto (2010: 97-103), adapun beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbing sosial. Bahwa ada lima peran di bawah ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial diantaranya sebagai berikut :

- a. Fasilitator merupakan peran fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau trasional.
- b. Broker merupakan seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien memperoleh keuntungan sebesar mungkin. tugas-tugas pekerja sosial sebagai broker
- c. Mediator merupakan peran ini sangat penting dalam paradigma generalis, peran mediator sangat diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator melalui kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai resolusi konflik.
- d. Pembela merupakan peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seseorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus.
- e. Pelindung yaitu melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial.

Merujuk pada uraian di atas bahwa peran pekerja sosial merupakan suatu peran yang akan membantu seseorang yang terkena permasalahan. Dalam hal tersebut peran fasilitator itu dapat mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapai tujuannya. Lalu dapat

membantu agar mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan seseorang yang terkena masalah, peran fasilitator ini juga dapat membantu memfasilitasi keterkaitan dan kualitas sinergi sebuah sistem, menemukan kesamaan dan perbedaan yang awalnya saling egois akan pendapatnya masing-masing tetapi setelah diberi bantuan masalah tersebut dapat terpecahkan dengan solusi-solusi yang alternative.

Peran selanjutnya yaitu peran broker dimana seorang broker itu harus dapat membantu seorang mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten, lalu broker itu harus mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan klien agar masalah tersebut selesai. Selanjutnya peran mediator yaitu dengan cara mediasi lalu kita bisa mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik atau masalahnya lalu kita dapat memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar berbicara satu sama lain.

Peran selanjutnya yaitu peran pembela dimana seorang pekerja sosial akan memberikan seorang tersebut kesempatan untuk saling keterbukaan atau membiarkan berbagai pandangan untuk di dengar antara satu dengan yang lainnya dalam hal keadilan. Dan peran terakhir dimana peran ini memberikan perlindungan yang baik akan seseorang tersebut yang terkena masalah akan menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan, dan dapat berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

2.3.4 Metode Intervensi Pekerjaan Sosial

Metode intervensi sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari individu, kelompok, dan masyarakat. Menurut Rukminto (2013: 161) metode intervensi sosial, sebagai berikut :

- a. Intervensi Sosial pada individu dan keluarga atau (*Casework*).
- b. Intervensi sosial kelompok atau (*Social Grup Work*).
- c. Intervensi sosial komunitas dan organisasi atau (*Community Organization Community Development*).

Metode intervensi sosial komunitas merupakan metode yang diarahkan pada upaya mengubah masyarakat di tingkat yang lebih luas, seperti di tingkat provinsi. Dengan kata lain metode intervensi ini berfokus pada strategi dalam pengembangan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan sosial rakyat disuatu negara.

Penjelasan diatas merupakan suatu metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individu mereka. Dalam hal ini keluarga menjadi fokus intervensi karena masalah yang dihadapi individu biasanya dipengaruhi oleh anggota keluarga mereka.

Penjelasan tentang metode intervensi sosial pada kelompok merupakan suatu metode yang dilakukan terhadap seseorang dalam suatu kelompok untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya didalam kelompok tersebut. Dengan kata lain metode sosial kelompok adalah suatu metode untuk mengembangkan relasi sosial dimana kelompok digunakan sebagai medianya karena kelompok itu memiliki kekuatan terhadap anggotanya itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Penjelasan tentang metode intervensi sosial komunitas merupakan metode yang diarahkan pada upaya mengubah masyarakat ditingkat yang lebih luas jangkauannya, seperti ditingkat provinsi. Dengan kata lain metode intervensi ini berfokus pada strategi dalam pengembangan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan sosial rakyat disuatu negara.

2.3.5 Fokus Intervensi Pekerjaan Sosial

Tahapan intervensi atau pelaksanaan program merupakan rangkaian kegiatan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial setelah kegiatan perencanaan kegiatan. Bentuk nyata kegiatan praktek pekerja sosial bersama masyarakat tersebut biasa disebut dengan pelaksanaan intervensi. Pelaksana intervensi adalah tindakan nyata atau tindakan konkrit yang berada didalam masyarakat untuk melaksanakan program tersebut secara konsisten, termasuk didalamnya dukungan ketersediaan anggaran dan profesionalisme pelaksanaan rencana.

Pekerjaan sosial merupakan cara yang bersifat sosial dan institusional untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah – masalah sosial yang mereka hadapi, guna memulihkan dan meningkatkan kemampuan untuk menjalankan fungsi sosial mereka.

2.3.6 Tahap – Tahap Intervensi Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan dan kewajiban untuk membantu atau menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga mereka nantinya mampu mencari jalan sendiri. Berkaitan dengan proses intervensi pekerjaan sosial tersebut, menurut Max Siporin yang dikutip oleh Iskandar (2013:65) adalah sebagai berikut

a. Tahap *engagement intake* dan kontrak

Bertemu dengan klien untuk bertukar informasi yang dibutuhkan, jenis pelayanan apa yang bisa diberikan untuk klien dalam pemecahan masalah, lalu akan terjadi saling mengenal dan kemudian terciptalah kontrak.

b. Tahap *assessment*

Merupakan proses penggalian dan pemahaman masalah yang dihadapi klien. Dengan demikian akan terlihat bentuk masalah, faktor penyebab dan akibat serta pengaruh masalah.

c. Tahap *planning*

Rencana proses penyusunan pemecahan masalah yang dihadapi klien. Rencana tersebut meliputi tujuan pemecahan masalah, sasaran serta cara memecahkan masalah.

d. Tahap *intervention*

Tahap pelaksanaan pemecahan masalah, dalam pelaksanaan kegiatan ini klien diharapkan mengikuti proses pemecahan masalah secara aktif.

e. Tahap evaluasi

Merupakan tahap pengevaluasian terhadap kegiatan intervensi yang telah dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk melihat tingkat keberhasilan, hambatan yang dialami oleh klien.

f. Tahap terminasi

Merupakan tahap pengakhiran atau pemutusan kegiatan intervensi, hal ini dilakuakn bila tujuan intervensi telah tercapai atau permintaan klien sendiri atau karena faktor – faktor tertentu.

2.4 Tinjauan Tentang Masalah Sosial

Masalah sosial ditafsirkan sebagai satu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat, kondisi yang tidak diinginkan tersebut merupakan kondisi tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku, serta dapat menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian fisik maupun nonfisik.

2.4.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial problema perbedaan antara yang *dass saollen* (yang seharusnya, yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang diharapkan) dengan *dass sein* (yang nyata, yang terjadi). Dengan kata lain, masalah ada perbedaan antara yang *ideal* dan yang *real*. masalah juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak mengenakan karena terjadinya perbedaan persepsi antara satu dengan yang lain, kelompok maupun dengan masyarakat. masalah sosial menurut definisi Soetarno dalam Huraerah (2011: 4) :

“masalah sosial merupakan kondisi sosial yang dinilai orang sebagai kondisi yang tidak enak. Masalah atau tidaknya suatu kondisi sosial bergantung orang atau pihak yang memberikan penilaian. Suatu masalah sosial akan sangat sulit penangulangannya kalau lebih banyak orang yang menilainya tidak sebagai masalah”.

Dari penjelasan definisi diatas, bahwa masalah sosial merupakan kondisi yang tidak mengenakan yang dialami oleh setiap orang, bedar kecilnya masalah sosial tergantung dari individu ataupun masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan. Masalah sosial tidak akan bisa terselesaikan tanpa ada usaha yang maksimal dalam penyelesaiannya.

Setiap manusia mempunyai pandangan tentang masalah, baik masalah individu, kelompok, maupun masyarakat. Karena setiap masalah muncul karena adanya perbedaan persepsi. Begitupun dengan masalah sosial Kratini Kartono dalam Huraerah (2011 : 4) mempunyai pandangan tentang masalah sosial, di antaranya adalah :

- a. semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan istiadat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
- b. situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.

Dengan demikian, jelas bahwa adat istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrolan dan nilai sanksional terhadap tingkah laku terhadap anggota masyarakat. Oleh karenanya. Tingkah laku yang dianggap sebagai tidak cocok, melanggar norma dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, dikategorikan sebagai masalah sosial.

Masalah sosial mempunyai beberapa komponen, komponen tersebut di kemukakan oleh Parillo yang dikutip oleh Soetomo dalam Huraerah (2011 : 5), untuk lebih memahami pengertian masalah sosial perlu memperhatikan komponennya, yaitu :

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan kepecahan.

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan, bahwa masalah sosial itu merugikan kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena jika kita mempunyai masalah sosial akan menyebabkan dampak negatif bagi kita maupun masyarakat, dan

masalah sosial kondisi itu menyebabkan kita sulit untuk mencapai kondisi kehidupan yang sejahtera.

Robert K. Merton mendefinisikan masalah sosial dengan menyebut ciri-ciri pokok masalah sosial. Baginya ciri-ciri masalah sosial itu adalah “jurang perbedaan yang cukup signifikan antara standar-standar sosial dengan kenyataan sosial. Dari definisi di atas dijelaskan bahwa masalah sosial selalu mengacu kepada suatu jurang antara harapan-harapan yang ada, baik pada seorang individu maupun suatu kelompok, dengan kenyataan-kenyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dapat dipenuhi, nilai-nilai, dan tujuan apa yang bisa tercapai, bagaimana seseorang seharusnya bertindak apa yang dapat diperoleh orang di dalam suatu masyarakat.

Menurut Horton dan Leslie dalam Suharto, masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta pemecahan aksi sosial secara kolektif. Dari definisi ini dapat diuraikan, masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Kondisi yang dirasakan banyak orang

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila dirasakan oleh banyak orang. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum, jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan menarik perhatian orang.

b. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan

Menurut paham Hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang

senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan.

c. Kondisi yang menuntut pemecahan

Suatu kondisi yang baik menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan, umumnya suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

d. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif

Masalah sosial individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akhirnya multimedimensional dan menyangkut banyak orang.

Dengan demikian dapat diuraikan, bahwa karakteristik masalah sosial itu kondisi yang tidak mengenakan yang dirasakan oleh banyak orang, dimana seseorang mengalami rasa tidak nyaman, rasa tidak menyenangkan, dan kondisi tersebut membutuhkan pemecahan atau penyelesaian. Penyelesaian masalah sosial harus dilakukan melalui rekayasa sosial. Seperti aksi sosial, kebijakan sosial, perencanaan sosial. Karena masalah sosial bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.4.2 Dimensi dan kategori Masalah Sosial

Dimensi-dimensi masalah sosial ini bertujuan untuk lebih memahami masalah sosial yanaga terjadi, agar kita lebih peka terhadap segala sesuatu yang

menyangkut masalah sosial dan kita bisa mengatasi masalah sosial yang terjadi.

Dimensi masalah sosial, antara lain :

- a. Setiap masalah bersifat multidimensional dalam pengertian adanya jaringan faktor-faktor fisik, mental, dan emosional.

- b. Dimensi struktural dan klinis

Masalah sosial berdimensi struktural faktor penyebabnya berakar pada struktur masyarakat, dimensi klinis masalah sosial berakar pada kekurangan atau kelemahan pada diri individu.

- c. Dimensi absolut dan relatif

Kemiskinan disebut absolut kalau indikator kemiskinan berlaku di manapun, baik di negara maju maupun di Negara Berkembang. Kemiskinan bersifat relatif kalau indikatornya berlaku di Negara tertentu.

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa dimensi sosial disebabkan oleh faktor struktur masyarakat, dan masalah sosial berakar pada kekurangan atau kelemahan pada diri individu, sehingga menyebabkan keadaan yang tidak sinkron dan keadilan yang tidak nyaman bagi masyarakatnya sehingga timbul masalah sosial.

2.5 Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun

melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada dimasyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

2.5.1 Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok dan msyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik diluar maupun didirinya. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pelayanan sosial menurut Kahan dalam Fahrudin, (2012:51) adalah :

Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individu, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Pelayanan sosial dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbangan dan pertolongan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan pemecahan masalah.

2.5.2 Bidang-bidang Pelayanan Sosial

Menurut Suharto (2013:14) dalam suatu pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat setidaknya terdapat 5 bidang pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan sosial itu antara lain :

a. Jaminan Sosial

Merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan.

b. Pelayanan Perumahan

Jaminan yang disediakan oleh pemerintah ini adalah perumahan publik atau perumahan sosial.

c. Kesehatan

Pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukan bagi warga kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi-asuransi kesehatan.

d. Pendidikan

Negara memiliki 3 kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademik dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga non formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk didalamnya penyediaan skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak mampu.

e. Pelayanan Sosial Personal

Pelayanan ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial diluar pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup tiga jenis :

1. Perawatan Anak
2. Perawatan Masyarakat, dan

3. Perawatan Keadilan dan Kriminal

2.6 Tinjauan Tentang Pemberdayaan

Pemberdayaan UMKM Hawa Kreasi wadah yang menampung kegiatan pelatihan yang fungsinya untuk memberikan dan mengembangkan keterampilan, produktivitas, dan disiplin. Dengan adanya pelaksanaan program Pemberdayaan UMKM Hawa Kreasi ini diharapkan akan menciptakan masyarakat yang terampil dan berkualitas sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar, selain itu masyarakat diharapkan dapat berwirausaha secara mandiri dan bisa mengembangkan potensinya.

2.6.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari “*empowerment*” dalam bahasa Inggris. Mardikanto dan Soebianto (2012:27) dalam bukunya mengartikan pemberdayaan sebagai “upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya dan lain-lain”.

Selain itu Carlzon dan Macualey dalam Roesmidi dan Risyanti (2006:2) mengemukakan pemberdayaan “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya”. Sementara dalam sumber yang sama Craver dan Clatte Back dalam mendefinisikan pemberdayaan sebagai “usaha memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk

mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan cara kerja mereka dan meningkatkan kontribusi pada tujuan organisasi”

Berbeda pandangan dengan konsep sebelumnya, Dharmawan dalam Mardikantoe dan Soebiatoe (2012:28) mendefinisikan makna pemberdaya sebagai berikut :

“ A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to source of better living.”

Terjemahannya adalah sebuah proses memungkinkan orang-orang memiliki kekuatan agar dapat mengembangkan kapasitasnya, memiliki kekuatan dalam tawar-menawar agar mampu membuat keputusan-keputusannya sendiri dan untuk mempermudah akses terhadap sumber yang dapat meningkatkan hidupnya menjadi yang lebih baik dalam Mardikantoe dan Soebiatoe (2012:28) mendefinisikan pemberdayaan adalah :

Sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian.

Dengan konsep yang sedikit berbeda Soekarso dalam Huraerah (2011:98) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat hakekatnya memiliki dua pengertian yang saling berkaitan yakni :

- 1) Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung bentuk usaha kesejahteraan social
- 2) Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan peranannya

Craig dan Mayo dalam Huraerah (2011:96) mengatakan bahwa “ konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep kemandirian (*self-help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*) dan pemerataan (*equity*)”. Sejalan dengan pemikiran Craig dan Mayo tentang kemandirian dalam arti pemberdayaan dalam masyarakat, Sumodiningrat dalam Mardikantoe dan Soebiatoe (2012:47), mendefinisikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Undang-undang Nomor RI tahun 1995 tentang usaha kecil, memberikan definisi pemberdayaan adalah “upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Berdasarkan literatur diatas, disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah usaha/upaya strategis untuk meningkatkan kekuatan, keterampilan, akses dan kekuasaan individu, kelompok atau masyarakat yang kurang beruntung (lemah) agar dapat mandiri dalam mengakses sistem sumber dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

2.6.2 Ruang Lingkup dan Sasaran Pemberdayan

Wasistiono dalam Roesmidi dan Riyanti (2006:6) membedakan pemberdayaan menjadi empat macam, dilihat dari sasaran dan ruang lingkungnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan pada individu anggota organisasi atau anggota masyarakat

- 2) Pemberdayaan pada tim atau kelompok masyarakat
- 3) Pemberdayaan pada organisasi; dan
- 4) Pemberdayaan pada masyarakat secara keseluruhan

2.6.3 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan sudah tentunya memiliki tujuan (*goals*). Ife & Tesoriero menjelaskan tujuan pemberdayaan dalam sebuah definisi yang sederhana, yaitu “pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*). Masih dalam makna yang sedikit sama, Payne dalam Huraerah (2011:99) memberi gambaran bahwa “tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membeantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya yang lebih besar”.

2.6.4 Pemberdayaan Sebagai Proses

Proses pemberdayaan cenderung seringkali dikaitkan sebagai unsur pendorong. Secara konseptual Saraswati dalam Huraerah (2011:100) membagi proses pemberdayaan meliputi :

- 1) *Learning by doing*
Pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan atau suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
- 2) *Problem Solving*
Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- 3) *Self Evaluation*
Pemberdayaan harus mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- 4) *Self Development and Coordination*
Bahwa pemberdayaan harus mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- 5) *Self Selection*
Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
- 6) *Self Decisim*

Memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri (self confidence) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (self decisim).

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan sebagai proses apabila adanya proses pembelajaran, pemecahan masalah, evaluasi secara mandiri, pengembangan diri, koordinasi dan pemulihan tindakan atau langkah-langkah yang tepat kedepannya.

2.6.5 Tahapan Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan dapat dicapai dengan menerapkan tahapan-tahapan pemberdayaan. Edi Suharto (2009:67-68) menguraikan tahapan-tahapan pemberdayaan dengan singkat 5P sebagai berikut :

- 1) **Pemungkinan**
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) **Penguatan**
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) **Perlindungan**
Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kelompok kuat dan kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) **Penyongkongan**
Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus menyongkong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) **Pemeliharaan**
Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara kelompok berbagai kelompok dan masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Disatu sisi, Azis dalam Huraerah (2011:102) menawarkan rincian tahapan-tahapan yang seharusnya di lalui dalam melakukan pemberdayaan. Adapun tahapan-tahapan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya
- 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan secara mandiri(partisipatif), bisa melalui diskusi kelompok, curah pendapat dan pertemuan yang periodik.
- 3) Menentukan secara prioritas masalah, dalam arti memilih dan memilah tiap masalah yang paling mendesak untuk di selesaikan.
- 4) Mencari penyelesaian masalah yang sedang di hadapi dengan pendekatan sosial-kultural yang ada di masyarakat.
- 5) Melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi.
- 6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauhmana keberhasilan dan kegagalannya.

Berdasarkan berbagai teori di atas dan konsep tentang tahapan-tahapan pemberdayaan diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam pemberdayaan, perlu adanya penyadaran, pemungkinan, sosialisasi, analisis kebutuhan, permasalahan dan potensi, menyusun rencana tindakan, pelaksanaan rencana, monitoring dan evaluasi dan terakhir pemandirian masyarakat.

2.6.6 Prinsip Prinsip Pemberdayaan

Soedijianto dalam Mardikanto dan Soebiatoe (2012:108-109) memujnculkan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

- 1) Kesukarelaan
Keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus di landasi kesadaran sendiri dalam motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang di rasakannya.
- 2) Otonom
Kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri ketergantungan yang di miliki oleh setiap individu, kelompok, masyarakat ataupun kelembagaan lainnya.

- 3) Kesewadayaan
Kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu dan mengharapkan dukungan pihak luar.
- 4) Partisipatif
Keterlibatan semua *stakeholder* sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil kegiatan lainnya.
- 5) Egaliter
Menempatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kedudukanyang setara, sejajar, tidak ada yang di tinggikan dan tidak ada yang merasa di rendakan.
- 6) Demokrasi
Memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara *stakeholder*.
- 7) Keterbukaan
Keterbukaan yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.
- 8) Kebersamaan
Saling berbagi rasa, saling membantu, dan mengembangkan sinergisme.
- 9) Akuntabilitas
Dapat di pertanggung jawabkan terbuka untuk di awasi oleh siapapun.
- 10) Desentralisasi
Memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Literatur diatas menggambarkan bahwa prinsip pemberdayaan, haruslah membangun relasi, melibatkan klien atau masyarakat sendiri dalam menentukan keputusan dan evaluasi, peningkatan partisipasi bagi semua pihak yang terlibat, membangun komunikasi yang harmonis, dan bertanggung jawab serta keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.6.7 Intervensi Komunikasi Model

Intervensi komunitas merujuk pada tindakan untuk menangani masalah sosial dengan pendekatan komunitas. Menurut Rotman dan Tropman dalam Adi mengemukakan setidaknya ada 3 model intervensi komunitas yakni sebagai berikut:

- 1) Pengembangan masyarakat lokal, yang mengacu pada konsensus.
- 2) Perencanaan dan kebijakan sosial, mengacu kepada kepatuhan.
- 3) Aksi sosial, mengacu kepada pendekatan konflik.

Menurut Rotman dalam Adi dua belas variabel untuk membedakan 3 model intervensi (Pendekatan) yang dilakukan dalam intervensi sosial di level komunitas, sebagai berikut :

- 1) Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat
- 2) Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya
- 3) Strategi dasar dalam melakukan perubahan
- 4) Karakteristik taktik dan teknik perubahan
- 5) Peran praktisi yang menonjol
- 6) Media perubahan dan orientasi terhadap struktur kekuasaan
- 7) Batasan definisi penerimaan layanan (beneficiaries)
- 8) Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok di dalam suatu komunitas
- 9) Konsepsi mengenai penerima layanan dan perannya.
- 10) Pemanfaatan pemberdayaan

2.7 Tinjauan Tentang Potensi Diri

potensi diri bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi diri yang dimaksud disini suatu kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah.

2.7.1 Pengertian Potensi Diri

Sri Habsari (2005:2) menjelaskan, potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang di miliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan kemungkinan untuk di kembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku dan psikologis yang dimiliki.

Menurut panitia istilah Paedagogik dalam Abu Ahmadi, yang dimaksud dengan daya berpikir atau intelegensi adalah alat-alat berpikir menurut tujuannya (stem, kamus paedagogik 1953). Disini dapat dilihat Stem menitik beratkan kepada soal “adjustment” terhadap masalah yang dihadapinya.

Orang yang intelegen akan lebih cepat dan lebih tepat didalam menghadapi masalah-masalah baru dibandingkan dengan orang-orang kurang intelegen. William Stern, salah seorang pelopor dalam penelitian Intelegensi mendefinisikan intelegensi sebagai kemampuan untuk menggunakan secara tepat segenap alat-alat bantu dari pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru.

Intelek, akal budi atau intelegensi adalah kemampuan untuk melakukan hubungan dari proses berpikir (Kartini Kartono 2006). Orang yang arid akan berpikir menabung, mengkombinasikan, mencari kesimpulan dan memutuskan. Maka orang yang intelegent dapat menjelaskan semua itu dalam tempo yang singkat, bisa memahami masalahnya lebih cepat dan cermat, dan mampu bertindak cepat (jiwanya lebih lemas).

Kekuatan atau intensitas rejana atau perasaan itu bergantung pada faktor emosionalitas yaitu besar kecilnya kepekaan terhadap perasaan. Dominasi dari perasaan-perasaan yang menyenangkan disebut eukoloi (jika tunggal;eu kolos). Pribadi bersangkutan cenderung melihat semua pengalamannya dengan rasa optimis dan dengan segera ia melihat segi-seginya yang indah serta menyenangkan. Sebaliknya dominasi perasaan negatif dan tidak menyenangkan disebut dyskoloi (tunggal;dyskolos). Cenderung melihat gejala kejadian dengan rasa duka, tidak senang, cemas/ takut, penuh pesimisme Kartini Kartono (1990:88). Perasaan rokhaniah dibagi dalam enam kategori sebagai berikut :

- a. Perasaan intelektual ialah perasaan yang dialami, apabila kita memahami satu kebenaran dengan pikiran kita yaitu merupakan rasa senang, tidak puas, sengsara karena tidak bisa menangkap dan mengerti suatu masalah.
- b. Perasaan estetis ialah perasaan indah/buruk ketika kita melihat dan mendengarkan sesuatu (perasaan keindahan). Keindahan bergantung pada bakat dan perkembangan indra yang berkenan dengan selera.
- c. Perasaan etis (moral/sosial) ialah perasaan yang kita alami pada penghayatan benar/baik, atau salah/jahat, kedua ukuran untuk merasakannya adalah hati nurani, *conscience*.
- d. Rasa diri adalah perasaan menghayati perasaan tingginya harga diri sendiri. Menurut Alfred Adler dalam Kartini Kartono meliputi perasaan lebih yang positif yakni rasa kuat, mampu, megah, dan optimis. Sedangkan perasaan lebih yang negatif yakni sombong, congkak, terkabur, kakak, tinggi hati.

- e. Perasaan sosial ialah perasaan terhadap orang lain yakni perasaan mengenali suka duka orang lain dan ikut merasakan kehidupan orang lain antara lain cinta dan benci, perasaan dan permusuhan, simpati dan empati, kasihan, ikut merasa gembira, egoisme, segan, dan sosialitas.
- f. Perasaan religius (metafisik atau absolut) adalah perasaan yang berkaitan dengan kekuasaan Tuhan. Misalkan tawakal, percaya, keyakinan, akan kekuasaan Tuhan, kepercayaan, rendah hati, kesadaran, dan penyesalan.

Menurut Siahaan (2004:4) pengertian potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi. Potensi diri adalah kemampuan yang terpendam pada diri setiap orang, setiap orang memilikinya. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut (Wiyono, 2006:37). Demikian potensi diri manusia adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam didalam dirinya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia.

Slamet Wiyono (2006:38) dalam bukunya (*Manajemen Potensi Diri*) potensi diri manusia dibagi dalam beberapa jenis yaitu :

- a. Potensi Fisik (Psychomotric) / Indra

Potensi fisik berupa indra manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk

mendengar dan lain-lain. Potensi fisik dapat dikatakan sebagai kekuatan energi yang dapat melakukan berbagai aktifitas yang menentukan mampu atau tidaknya sesuatu yang kita lakukan mengikuti hati dan pikiran, kemudian inra akan melakukan tindakan dan kegiatan untuk menggapai impian atau suatu tujuan.

Potensi ini tentunya ditunjang dengan kesehatan fisik/inra sehingga dapat berfungsi sesuai fungsinya. Kesehatan fisik merupakan faktor pendukung untuk melakukan segala aktivitas dan sebagai suatu sumber potensi apabila dijunjang dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi cukup, mengkonsumsi makanan dengan seimbang, berolahraga secara teratur, dan memeriksakan kesehatan secara teratur.

b. Potensi Mental Intelektual (*Intellectual*)

Potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia terutama otak kiri dan otak kanan. Secara tingkas fungsi otak kiri adalah untuk menghafal/ mengingat, logika/menghitung, menganalisis, dan berbahasa. Sedangkan fungsi otak kanan adalah untuk melakukan aktivitas imajinasi/intuisi, kreasi/kreativitas. Inovasi dan seni. Tugas otak tersebut akhirnya adalah melakukan kegiatan berfisik untuk menghasilkan karya nyata melalui bahasa, logika, intuisi, kreatifitasnya untuk mempelajari pengetahuan umum dan pemahaman terhadap kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Jadi otak adalah sumber kekuatan manusia untuk menghasilkan karya nyata melalui proses berfikir.

Akal dan pikiran individu atau manusia secara umum dapat memfungsikan akal dan pikiran tersebut untuk suatu tujuan hidup. Selanjutnya

aktivitas berpikir akan menghasilkan hasil pikir, maka pada giliran selanjutnya akan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan misalnya aspek ekonomi, keuangan, politik, sosial, keamanan, dan budaya.

c. Potensi Sosial Emosional (*Emotional*)

Potensi berkenaan dengan hati, rasa, nafsu dan jiwa individu atau manusia pada umumnya. Merupakan potensi yang ada pada diri manusia yang fungsinya antara lain untuk mengendalikan amarah, motivasi, dan penilaian. Dengan demikian emosi individu tersebut tergantung bagaimana cara mengaktualisasikannya kedalam kehidupan seperti berinteraksi, berpartisipasi, dan penyesuaian diri. Oleh karena itu langkah yang paling strategis untuk menggapai sukses dan bahagia hidup adalah membersihkan berbagai macam masalah yang mempengaruhi pada hati dan pikiran.

Ketiga jenis potensi diatas akan diarahkan oleh pribadi itu sendiri, apakah dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhannya atautkah dibiarkan begitu saja dengan berlalunya waktu, kesemuanya itu tergantung bagaimana pribadi itu mengelola potensi tersebut. kecerdasan otak, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual menjadi kunci sukses dan kebahagiaan yang sangat penting.

Potensi diri menurut Andre Wongso dalam Wiyono (2006) membagi manusia menjadi 3 kelompok berdasarkan kesempatan atau peluang usaha dalam hidupnya yaitu sebagai berikut :

a. Tipe manusia yang menunggu kesempatan/peluang (disebut orang lemah).

Kelompok ini dalam hidupnya hanya mengandalkan adanya peluang yang

datang pada dirinya dengan kata lain kalau tidak ada peluang yang datang, mereka tidak mau melakukan usaha atau menciptakan kesempatan.

- b. Tipe manusia yang dapat menciptakan kesempatan (disebut orang kuat). Tipe manusia jenis pencipta kesempatan ini tidak sabar menunggu kesempatan datang karena kesempatan datang tidak tentu waktunya sehingga baginya menunggu adalah tindakan yang sia-sia. Karena sadar akan potensinya, dia akan bersikap proaktif untuk menciptakan peluang bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- c. Tipe orang yang mengetahui dan dapat menciptakan peluang sera dapat memanfaatkannya (disebut orang yang bijaksana dan cerdas). Tipe orang yang proaktif sekaligus aktif dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang.